

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arah pembangunan dalam rangka menghadapi perkembangan era otonomi daerah serta pesatnya dinamika perkembangan kondisi makro (global) secara menyeluruh harus dapat dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki serta mengatasi hambatan dan tantangan yang ada untuk proses percepatan pembangunan daerah khususnya terhadap pembangunan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan pembangunan ke depan, dimana dinamika otonomi dan globalisasi dengan akselerasi yang demikian hebat sangat menuntut adanya penataan ulang (perencanaan yang komprehensif) agar pembangunan Kabupaten Mojokerto khususnya bidang perumahan, permukiman dan perhubungan dapat tetap dinamis dan efektif dalam menjawab tantangan ke depan, maka perlu adanya suatu perencanaan yang strategis dan komprehensif sehingga dengan semakin terarah dan terakomodasinya berbagai variabel pembangunan yang ada diharapkan diperoleh penajaman arah pembangunan yang kompeten dan akurat. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan daerah, khususnya pembangunan bidang perumahan, permukiman dan perhubungan perlu untuk menyusun suatu rumusan program dan kegiatan secara berjenjang menurut skala prioritas dalam suatu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rancangan Awal (Ranwal).

Rencana strategis DISHUB KOMINFO kab mojokerto tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 22 -09-2016 nomor 108.45/1032/416-106/2016 melalui SK KAdishub KOMINFO. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk susunan struktur organisasi yang baru nomor 11 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja DPRKP2 kab. Mojokerto. Oleh karena itu DPRKP2 melakukan perubahan terhadap renstra. DPRKP2 tahun 2016-2021 yang ditetapkan pada 1-12-2017 dengan nomor 108.45/2649/416-104/2017 berdasarkan SK Kepala Dinas DPRKP2. Peraturan menteri dalam negeri nomr 86 tahun 2017 tentang perangkat daerah dengan amanah perubahan RPJMD dan ditindak lanjuti dengan

perubahan renstra 2016-2021 sesuai dengan dasar Surat Gubernur Jawa Timur 700/1139/031.2/2018, perihal Hasil Evaluasi Atas Sakip 2017 tetap Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021. Dalam program dan kegiatan disesuaikan dengan nomenklatur SOTK yang dirubah di tahun anggaran 2020-2021

Perencanaan pembangunan yang disusun secara komprehensif tersebut harus mampu mengakomodasi segala potensi dan peluang sumber daya (alam, manusia, dll) dan memperhatikan segala hambatan baik yang endemis maupun yang berpotensi menjadi permasalahan serius di masa mendatang sehingga didapat suatu perencanaan yang terarah, terprogram dan berkesinambungan. Sebab dampak era keterbukaan (global) pada saat setelah diberlakukannya otonomi daerah akan membawa permasalahan yang serius terutama bagi daerah/Kabupaten yang tidak siap menghadapinya. Khususnya pada bidang perumahan, permukiman dan perhubungan akan menjadi lebih kompleks, dimana pertumbuhan dan kebutuhan pembangunan perumahan penataan permukiman serta dinamika pergerakan manusia, pembangunan perumahan dan permukiman serta kendaraan maupun barang akan lebih cepat, massal dan butuh keterpaduan yang tinggi antar sub sistem. Sehingga dibutuhkan pengembangan antar sub sistem sehingga menjadi satu kesatuan sistem baik, yaitu :

Pengembangan sistem bidang perumahan, permukiman dan sarana jalan

1. Penataan kawasan kumuh perkotaan masih dalam tahap DED untuk tahun anggaran 2016;
2. Belum ada regulasi, kebijakan, dan prototype mengenai konsep rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah (MB)
3. Pengembangan sistem bidang sarana dan prasarana LLAJ
4. Pengembangan sistem bidang pengembangan industri LLAJ
5. Pengembangan sistem bidang pengembangan teknologi LLAJ
6. Pengembangan sistem registrasi, penegakan hukum, Operasional Manajemen Reka Lalin dan Pendidikan Berlalu lintas

Disamping itu dengan semakin pesat dan canggihnya perkembangan teknologi informasi (TI) dan tingginya ketergantungan kepada TI, serta semakin tingginya tuntutan masyarakat dan adanya persaingan yang lebih tajam akan sangat ditentukan bagaimana kemampuan suatu daerah dalam mem-visi-kan pembangunan serta menjabarkan dan

mengimplementasikannya dalam kegiatan pembangunan untuk menjawab tantangan di atas.

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005–2025.

Program pembangunan di dalam Ranwal Renstra ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Penajaman arah pembangunan tertuangdalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan strategi kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Dokumen Reviu Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Organisasi Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Reviu Renstra ini merupakan langkah awal pembangunan tahun 2016-2021 dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (10) : “Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif “
2. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rerncana Prembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka {Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
6. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kadudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 -2021 adalah agar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto mempunyai arah dan langkah-langkah yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjawab permasalahan dan tuntutan yang melingkupinya agar didapatkan suatu perbaikan keadaan (hasil pembangunan) sesuai dengan direncanakannya.

Tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 adalah untuk :

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 ke dalam rencana kegiatan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
2. Menjabarkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 –2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan,
4. Melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah disusun.

1.3. Sistematika Penulisan

Renstra (Rancangan Perubahan) DPRKP2 ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi DPRKP2 sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perumahan, permukiman dan perhubungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra (Rancangan Perubahan) ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DPRKP2) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPRKP2 KABUPATEN MOJOKERTO

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
- d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Kawasan Permukiman;
 - 2) Seksi Pertanahan;
 - 3) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Pertanahan.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 2) Seksi Perparkiran;
 - 3) Seksi Terminal.
- f. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - 1) Seksi Angkutan;
 - 2) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3) Seksi Keselamatan dan Ketertiban.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang tercantum dalam Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah merupakan pedoman pelaksanaan tugas yang berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

II. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan upt di lingkungan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

III. Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi perumahan, prasarana,

sarana dan utilitas umum serta pemanfaatan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (skbg);
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

IV. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi kawasan permukiman, pertanahan serta inventarisasi dan perencanaan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- c. Pelaksanaan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- d. Pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- e. Pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- f. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
- g. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan;
- h. Pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;

- i. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- j. Pelaksanaan penetapan tanah ulayat;
- k. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong;
- l. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- m. Pelaksanaan penerbitan izin membuka tanah;
- n. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

V. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi prasarana dan sarana, perpustakaan serta terminal. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan prasarana dan sarana lalu lintas;
- b. Perumusan bahan kebijakan umum dan teknis bidang prasarana dan sarana lalu lintas;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional, prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- d. Perumusan bahan penetapan prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang prasarana dan sarana lalu lintas, perpustakaan dan terminal;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

VI. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan meliputi angkutan, manajemen rekayasa lalu lintas

serta keselamatan dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan penyusunan rencana program kerja dan kebutuhan anggaran kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Perumusan bahan rumusan kebijakan umum dan teknis bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Perumusan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis dibidang angkutan jalan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2. Sumber Daya Pearangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

- | | |
|-----------------|------------|
| a. Golongan IV | : 6 orang |
| b. Golongan III | : 28 orang |
| c. Golongan II | : 38 orang |
| d. Golongan I | : 6 orang |

Sedangkan jenjang pendidikan aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

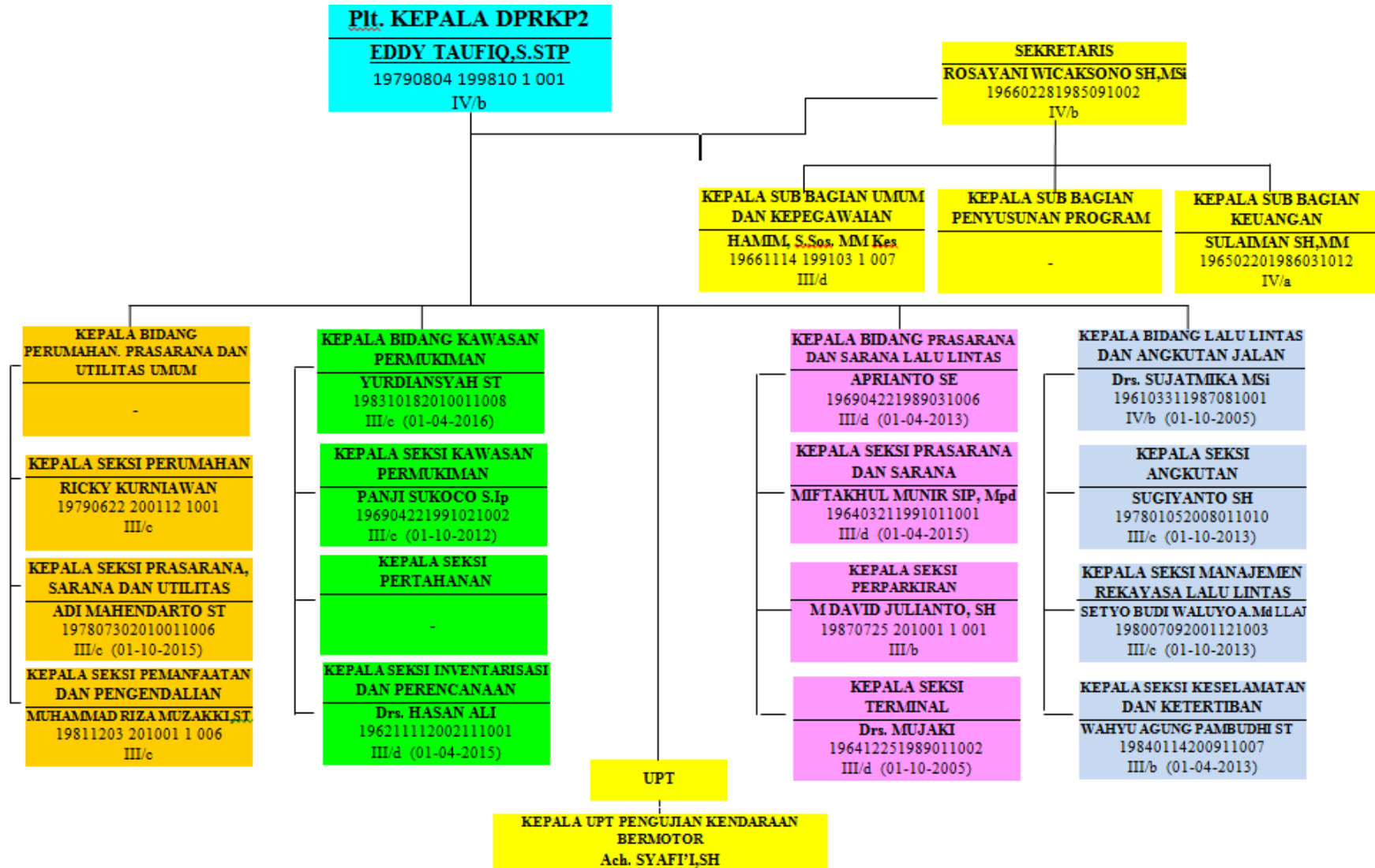
- | | |
|-------------|------------|
| a. Strata 2 | : 6 orang |
| b. Strata 1 | : 25 orang |
| c. SMA | : 41 orang |
| d. SMP | : 4 orang |
| e. SD | : 2 orang |

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terdiri atas :

1. Aset berupa tanah sarana umum terminal 40, Tanah sarana umum taman 2, tanah untuk penggunaan lainya 1.
2. Kendaraan dinas roda empat 9 unit dan sepeda motor 21unit , lainya 2 unit.
3. Alat-alat bengkel 17 unit dan alat ukur sejumlah 10 unit
4. Alat-alat kantor 70 unit, alat dapur 2 unit, alat meubelair 120 unit, alat komputer 55 unit.
5. Alat-alat studio 16 unit dan komunikasi sejumlah 3 unit berupa amplifier/mic/corong
6. Gedung kantor 3 lokasi untuk sarana transportasi (terminal) termasuk UPT Terminal dan UPT Pegujian Kendaraan Bermotor, gedung dan bangunan lainya 31.
7. Bangunan Monumen/rambu sejumlah 1.939 unit berupa alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL)
8. Instalasi Listrik, Telepon Fax 1 unit dan Telepon 1 unit

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN



Adapun sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.2 PNS BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	Kepala Dinas	-	-	
2.	Skretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang	2	-	2
4.	Kepala Sub Bagian	2	-	2
5.	Kepala Seksi	11	-	11
6.	Kepala UPT	1	-	1
7.	Kepala TU UPT PKB	1	-	1
8.	Staff	65	4	69
	JUMLAH	83	4	87

Tabel 2.3 PNS BPBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1.	S – 3	-	-	-
2.	S – 2	6	-	6
3.	S – 1	27	3	30
4.	D – IV	1	-	-
5.	SLTA	43	1	44
6.	SLTP	3	-	3
7.	SD	3	-	3
	JUMLAH	83	4	87

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP2 Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel TC - 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPRKP2 2011-2016

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Anggaran					Realisasi					Rasio				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	96,000,000	100,000,000	85,000,000	95,606,904	177,170,000	54,212,951	69,500,630	75,500,905	93,215,532	113,050,847	0.56	0.70	0.89	0.97	0.64
2	Penyediaan Jasa Pem. & Perijinan Kend. Dinas / Ops.	8,975,000	9,423,750	7,500,000	7,000,000	7,000,000	3,350,900	4,664,500	6,156,200	6,551,600	6,589,700	0.37	0.49	0.82	0.94	0.94
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keamanan	27,500,000	10,500,000	8,500,000	7,800,000	7,800,000	6,113,000	10,434,300	8,494,500	7,758,500	6,557,500	0.22	0.99	1.00	0.99	0.84
4	penyediaan Alat Tulis Kantor	6,220,000	28,875,000	25,000,000	31,650,000	51,640,000	27,500,000	28,874,800	24,979,900	31,659,520	40,342,760	4.42	1.00	1.00	1.00	0.78
5	Penyediaan Barang Cetak & penggandaan	260,101,300	556,256,250	500,000,000	576,903,096	478,470,000	251,541,125	530,156,480	488,367,880	568,000,050	380,923,400	0.97	0.95	0.98	0.98	0.80
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	28,875,000	45,000,000	71,475,000	61,122,500	-	28,864,800	43,645,000	70,415,000	28,849,000	#DIV/0!	1.00	0.97	0.99	0.47
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	15,000,000	21,000,000	20,000,000	30,750,000	40,750,000	14,838,500	20,730,000	20,000,000	30,675,000	29,370,000	0.99	0.99	1.00	1.00	0.72
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar & Dalam Derah	34,150,000	63,630,000	70,000,000	85,250,000	95,250,000	34,095,000	63,285,000	69,950,000	85,055,000	66,555,000	1.00	0.99	1.00	1.00	0.70
9	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	75,600,000	32,700,000	36,000,000	37,440,000	37,440,000	25,200,000	25,200,000	25,200,000	37,440,000	34,320,000	0.33	0.77	0.70	1.00	0.92
B	Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana															
1	Pengadaan Kendaraan	0	100,000,000	400,000,000	258,437,400	624,000,000	0	97,414,000	375,804,000	249,345,000	620,779,500	0	0.97	0.94	0.96	0.99

	Dinas / Operasional															
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	50,000,000	36,500,000	36,500,000	0	0	48,050,000	35,860,000	36,500,000	0	0	0.96	0.98	1.00
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11,500,000	45,750,000	12,500,000	86,800,000	35,000,000	11,497,000	45,424,000	12,497,900	86,737,400	34,977,500	1.00	0.99	1.00	1.00	1.00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas Ops.	50,000,000	57,500,000	40,000,000	89,400,000	70,000,000	48,598,000	56,697,391	39,993,396	89,300,000	69,940,000	0.97	0.99	1.00	1.00	1.00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8,165,000	10,500,000	8,500,000	20,500,000	38,350,000	8,150,000	10,500,000	7,750,000	20,500,000	20,500,000	1.00	1.00	0.91	1.00	0.53
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	18,870,000	0	79,850,000	64,900,000	37,860,000	18,854,550	18,854,550	79,794,140	61,887,160	35,413,000	1.00	0	1.00	0.95	0.94
D	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
1	Penyusunan Rencana Tahunan Dan Laporan Kinerja SKPD	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	4,040,000	4,925,000	0	0	0	0.81	0.99
E	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa															
1	Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	25,000,000	25,000,000	50,000,000	35,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	49,279,700	34,434,800	22,685,000	1.00	1.00	0.99	0.98	0.91
2	Sosialisasi dan Pembinaan Pengguna Angkutan Jalan	15,000,000	35,000,000	0	0	25,000,000	14,903,100	34,988,350	0	0	16,210,000	0.99	1.00	0	0	0.65
3	Operasi Telecenter	0	0	0	0	50,100,000	0	0	0	0	12,858,025	0	0	0	0	0.26

F	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Fasilitas LLAJ															
1	Monitoring Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000	49,960,000	47,410,000	0	0	1.00	1.00	0.95
2	Pameran Pembangunan dan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif(LCCK)	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	69,790,100	0	0	0	0	0.93
G	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ															
1	DAK Bidang	308,220,000	447,623,000	554,310,000	559,340,000	13,781,066	305,740,000	445,633,650	550,525,504	554,614,786	15,744,500	0.99	1.00	0.99	0.99	1.14
2	Pembangunan Zebra Cross SDN 1 Puri	65,000,000	0	0	0	0	63,665,800	0	0	0	0	0.98	0	0	0	0
3	Penyusuna CELL PLAN Beserta Kelengkapannya	0	150,000,000	0	0	0	0	147,850,000	0	0	0	0	0.99	0	0	0
4	Pemeliharaan APILL	0	50,000,000	100,000,000	0	0	0	49,365,000	99,146,100	0	0	0	0.99	0	0	0
5	Survey dan Perencanaan Rambu - rambu	0	0	0	50,000,000					49,773,380	0	0	0	0	1.00	0
6	Survey dan Perencanaan Rambu - rambu Trafic light	0	0	0	50,000,000					47,684,880		0	0	0	0.95	0
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	100,000,000	60,000,000	100,000,000	40,000,000	35,000,000	98,970,000	59,183,250	99,212,400	39,760,000	34,830,000	0.99	0.99	0	0.99	1.00

8	Pemeliharaan Pagar UPT. Terminal Mojokerto	0	0	100,000,000	0	200,000,000	0	0	97,500,000	0	198,486,000	0	0	0.98	0	0.99
9	Pembangunan Gedung Terminal Trowulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan															
1	Penganugerahan Duta Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000		48,645,000	48,309,000	44,234,940	40,313,000	0	0.97	0.97	0.88	0.81
2	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	380,090,000	490,500,000	500,000,000	550,000,000	550,000,000	379,303,600	490,230,000	500,000,000	549,999,940	550,000,000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	PAM Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	40,000,000	40,000,000	125,000,000	175,000,000	50,000,000	40,000,000	39,480,000	125,000,000	175,000,000	48,200,000	1.00	0.99	1.00	1.00	0.96
4	Peningkatan Disiplin Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Forum LLAJ	25,000,000	0	50,000,000	50,000,000	50,888,000	24,740,000	0	48,900,000	10,804,800	47,428,000	0.99	0	0.98	0.22	0.93
5	Penunjang DAK Bidang Transportasi Darat	25,000,000	50,000,000	27,000,000	50,000,000	3,000,000	24,324,500	45,594,900	24,919,800	49,797,500	0	0.97	0.91	0.92	1.00	0.00
6	Pendampingan DAK Bidang Transportasi Darat	0	0	55,431,000	55,934,000		0	0	55,052,550	55,051,437	0	0	0	0.99	0.98	0
7	Pembangunan / Rehab Tempat Parkir	0	0	0	50,000,000					49,870,400	0	0	0	0	1.00	0
8	Duta Tertib Lalulintas	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	23,695,000	0	0	0	0	0.95
9	PAM Insidentil	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	0	49,100,500	0	0	0	0	0.98
I	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah															

1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	285,825,500	228,000,000	250,000,000	180,550,000	188,000,000	284,779,300	227,581,500	241,554,750	169,259,000	187,762,500	1.00	1.00	0.97	0.94	1.00
J	Program Pengembangan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor															
1	Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	75,000,000	90,000,000	100,000,000	125,000,000	50,000,000	74,890,000	89,600,000	98,480,000	124,217,000	49,567,500	1.00	1.00	0.98	0.99	0.99
K	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalulintas dan Penigkatan Fasilitas Kelengkapan Jalan															
1	FS. Sarana dan Prasarana Perkembangan	0	0	100,000,000	0	7,770,000,000	0	0	96,814,800		7,565,062,305	0	0	0.97	0	0.97
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalulintas	75,000,000	120,000,000	175,000,000	50,000,000	200,000,000	73,630,500	118,218,300	174,043,700	49,773,380	198,044,460	0.98	0.99	0.99	1.00	0.99
3	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	0	0	200,000,000	0	0	0	0	198,610,400	0	0	0	0	0.99	0	0
4	Pengadaan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	75,000,000	62,480,000	125,000,000	-	50,000,000	73,348,000	59,335,600	121,032,900	0	47,795,000	0	0.95	0.97	0	0.96
L	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalulintas dan Penigkatan Fasilitas Kelengkapan Jalan		0	0								0	0	0	0	0.96
1	Peningkatan Fasilitas Penunjang Jalan	0	0	0	0							0	0	0	0	0.96
	JUMLAH	2,106,216,800	2,963,613,000	4,099,591,000	3,626,236,400	11,314,121,566	1,987,245,826	2,891,306,001	4,004,565,425	3,532,676,005	10,754,575,097	#DIV/0!	26	30	31	33

Tabel T.C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD

No	Uraian ****)	Anggaran pada Tahun ke-(dlm jutaan)					Realisasi Anggaran pada tahun ke -(dlm Jutaan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,130,149 000	2,612,359 000	2,870,172 700	3,000,000 000	3,650,700 000	2,291,615 500	2,725,261 000	2,966,842 500	3,214,462 500	3,493,299 000	108% 000	104% 000	103% 000	107% 000	96% 000		
2	Retribusi PKB - Mobil Barang/Beban Truk	903,000 000	1,806,130 000	1,951,360 000	2,049,000 000	2,400,000 000	1,287,161 900	1,951,363 800	2,145,361 900	2,272,824 800	2,314,592 000	143% 000	108% 000	110% 000	111% 800	96% 900		
3	Retribusi Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Komunikasi	0	0	1,100,000 000	5,118,828 000	2,000,000 000	0	0	1,394,658 404.50	661,004 983	1,628,200 834	0 #DIV/0!	0 000	127% 000	13% 000	81% 000		
4	Retribusi Terminal	234,109 500	187,505 '000	182,955 000	182,955 000	156,504 500	193,752 700	188,463 000	166,650 500	137,928 000	139,324 000	83% 140%	101% 000	91% 000	75% 000	89% 000		
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	104,717 500	349,830 100	313,097 000	413,450 000	577,500 000	142,290 069	349,845 823	342,136 162	371,305 855	408,990 973.50	136% 14%	100% 823%	109% 000	90% 000	71% 000		
6	Retribusi Perizinan Tertentu	16,790 000	10,269 000	7,667 000	7,767 000	8,160 000	18,253 200	9,429 000	7,693 000	5,014 000	4,196 000	109% #DIV/0!	92% 000	100% 000	65% 000	51% 000		
7	Lain-lain Pendapatan Asli/ Daerah yang sah	48,000 000	48,000 000	48,000 000	50,000 000	25,000 000	48,080 000	48,061 250	48,000 000	25,000 000	25,000 000	100% #DIV/0!	100% 000	100% 000	50% 000	100% 000		
TOTAL		3,436,766 000	5,014,093 100	6,425,251 700	10,822,000 000	8,792,864 500	3,981,153 369	5,272,443 873	7,023,342 466.50	6,687,540 168	7,988,602 807.50	116% #DIV/0!	105% 873%	109% 67%	62% 0	91% 162%		

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja DPRKP2 Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2011-2016 sudah cukup bagus. Dua indikator tercapai 100%, yaitu persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD). Hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan, namun demikian tetap menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Permukiman Rakyat Kawasan Perumahan dan Perhubungan adalah dibentuknya Perangkat Daerah Gabungan dimana Urusan Perumahan dan Permukiman itu mengampu 3 Kementrian, hal tersebut sangat membebani pada Perangkat Daerah yang baru dibentuk.

Untuk Urusan Perumahan dan Permukiman dengan SDM dan Sarana Prasarana yang kurang ditambah dengan Regulasi yang mendasari belum terbentuk memacu Aparatur untuk melengkapi perangkat lunak dan juga saprasnya.

Peluang yang dapat mengembangkan urusan Perumahan dan Permukiman adalah di telaah hasil RTRW memberikan peluang untuk pengembangan Perumahan dan Permukiman itu sebagai salah satu dasar Urusan Perumahan dan Permukiman untuk megembangkan Perangkat Daerah di Lima Tahun Mendatang.

Tantangan pada urusan Perhubungan makin berkurangnya Mobil Kendaran Umum dan mengakibatkan fungsi terminal berkurang, Regulasi tentang kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang rencana direvisi tetapi sampai dengan Tahun 2018 belum ada Revisi Peraturan Menteri Perhubungan pengganti KM 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sehingga pelaksanaan kegiatan penghargaan WTN Tahun 2017 dan Tahun 2018 tidak melaksanakan,

Peluang urusan Perhubungan adalah meningkatnya kendaraan umum Barang atau orang yang meningkat itu membuat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menata diri untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat salah satu peluang untuk pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima Tahun mendatang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KEWENANGAN

Banyak hal yang terkait dalam permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, sehingga timbul beberapa isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

1. Penataan kawasan kumuh masih dalam tahap DED untuk tahun anggaran 2016
2. Belum adanya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP)
3. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
4. Semakin berkembangnya industri properti.
5. Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/mengganggu fungsi terminal.
6. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
7. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.
8. Kabupaten Mojokerto merupakan Wilayah Gerbang Kertasusila dan dekat dengan ibukota provinsi sehingga menjadi wilayah dengan tingkat lalulintas kendaraan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalulintas.
9. Regulasi WTN dari Kementerian Perhubungan belum turun sampai dengan Tahun 2019 sehingga pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha tidak bisa dilaksanakan.

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Universal akses yang mencakup target di tahun 2019 : 100-0-100 (100% air bersih, 0 Ha Kumuh dan 100% sanitasi) berdasarkan PP No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	Kurangnya Kegiatan yang mendukung tercapainya Universal akses, terutama penanganan Perumahan dan permukiman kumuh	Belum adanya Rencana Penanganan dan Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
2.	Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha yang tidak terlaksana	Tahun : 2017 dan 2018 tidak melaksanakan kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Belum terbitnya Revisi Peraturan Menteri Perhubungan NO. 5 Tahun 2010

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Dalam menjalankan Visi dan Misinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan terkait visi dan misi Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

VISI :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Melalui Penguatan dan pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan

MISI :

Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis dan pariwisata

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dalam menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan dijabarkan dalam rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan di tindak lanjuti dengan Rencana Strategis (Rancangan Perubahan Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan akan senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis dimana pengaruh lingkungan tersebut akan sangat menentukan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun lingkungan strategis yang dimaksud adalah lingkungan internal yang terdiri dari faktor faktor penghambat ataupun faktor faktor pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah

Misi Bupati tersebut senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis dimana pengaruh lingkungan tersebut akan sangat menentukan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.3.1. A. Faktor Faktor Penghambat atau Kelemahan

1. Belum optimalnya kinerja aparat sebagai akibat masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan ketrampilan mengenai aspek teknis dan operasional.
2. Keterbatasan wewenang dalam melakukan pengendalian dan penegakan hukum.
3. Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan latihan yang berkelanjutan untuk menunjang SDM yang berkualitas.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan operasional.
6. Masih terbatasnya kemampuan manajerial dari sebagian besar staf mengenai aspek operasional kegiatan.
7. Masih lemahnya kepastian hukum terutama aspek kepegawaian (*reward and punishment*).
8. Masih kurang mantapnya kinerja lembaga akibat tumpang tindihnya tupoksi antar instansi.
9. Masih kurangnya tenaga dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dan kompatibel.
10. Masih kurangnya sumber dana untuk operasional kegiatan pada masing-masing bidang.
11. Masih kurangnya jumlah staf masing-masing bidang.
12. Belum optimalnya pemanfaatan sarana yang dimiliki dalam rangka menunjang kegiatan dinas.
13. Masih kurang sinergisnya diantara masing-masing sub dinas dalam hal pelaksanaan kegiatan.
14. Letak kantor jauh dari pusat pemerintahan.

B. Faktor Pendorong/ Kekuatan

1. Adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto (Dishubkominfo) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008.

2. Adanya dukungan sumber pendanaan yang berasal dari APBD.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.

Dengan adanya (RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah membantu DPRKP 2 dalam memetakan pengembangan kawasan Permukiman dan peningkatan Sanitasi Air juga meminimkan Luas Kawasan Kumuh Terkait hal tersebut Kami belum bisa menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah karena Perangkat Daerah yang mengampu kegiatan tersebut baru dibentuk Tahun 2017.

Adapun untuk Yang terkait dengan urusan Perhubunganyang bisa kami tunjukkan tingkat capain kinerjanya hanya di Indikator Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang s/d Tahun awal Renstra Tahun 2016 sudah pada Target 65 % walaupun Realisasinya masih 56 %, Dan Penghargaan WTN dengan Nominasi Nasional tetap hasilnya 100 %.

3.5. Penentuan ISU-ISU STRATEGIS

1. Penataan kawasan kumuh masih dalam tahap DED untuk tahun anggaran 2016.
2. Belum adanya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP).
3. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang membutuhkan tempat tinggal yang layak huni.
4. Semakin berkembangnya industri properti.
5. Semakin berkurangnya transportasi umum membuat menurunnya jumlah penumpang sehingga secara faktual mengurangi/mengganggu fungsi terminal.
6. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat milik pribadi yang murah untuk mendapatkannya, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kesemrawutan lalulintas.
7. Tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalulintas kurang sopan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalulintas.
8. Kabupaten Mojokerto merupakan Wilayah GerbangKertasusila dan dekat denga ibukota propinsi sehingga menjadi wilayah dengan tingkat lalulintas

kendaraan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan potensi kerawanan lalulintas.

9. Regulasi WTN dari Kementerian Perhubungan belum turan sampai dengan Tahun 2018 sehingga pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha tidak bisa dilaksana

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari sasaran 2 RPJMD yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Reviu Renstra;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Perubahan Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan Misi ke 7 Bupati menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan misi ” Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan penataan kawasan permukiman sesuai fungsi tata ruang yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah”, maka ditetapkan tujuan :
 - a. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang

ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka pada Perubahan Renstra ada perubahan di Tahun 2020-2021, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. IKM Terhadap Layanan Perhubungan
2. Meningkatnya infrastruktur kesehatan permukiman

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Target Indikator Sasaran SKPD					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rangking WTN Nominasi Tingkat Nasional	Meningkatnya layanan perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan	-	55	60	70%	80	85
			Persentase Fasilitas Sarana prasarana jalan yang terpasang	-	75	75	80	85	90
			Jumlah cakupan layanan pengamanan lalu lintas	60	65	68	70	70	75
			persentase angkutan umum yang layak jalan	56	60	68	70	75	75
			cakupan wilayah layanan perparkiran	60	65	70	75	80	85
2	Persentase rumah layak huni	meningkatnya infrastruktur permukiman	Persentase peningkatan rumah layak huni	39,2 9	10,3 2	25	33,3 3	50	55
			persentase penurunan luas kawasan kumuh	0,10 9	0,08 9	0,05	0	0	0
			Persentase Peningkatan akses penggunaan air bersih	74,4 4	79,9	89,9	100	100	100
			persentase cakupan sanitasi di kawasan permukiman	74,4 4	79,9	89,9	100	100	100
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public	IKM Terhadap layanan perhubungan	Program Prasarana dan Sarana lalu Lintas						
			Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						
		Meningkatnya infrastruktur kesehatan	Persentase Perumahan yang dibangun						
			Persentase Penurunan Luas						

No	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Target Indikator Sasaran SKPD					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Kawasan Kumuh						

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto

1. Menyusun dokumen – dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan.
2. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan, sarana sanitasi, sarana air bersih, dan penataan kawasan kumuh.
3. Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis.

5.2. Arah Kebijakan

1. Menyusun data base perumahan dan kawasan permukiman.
2. Menyusun masterplan drainase, air bersih, sistem penanggulangan kebakaran, penataan kawasan kumuh, dan penataan sanitasi masyarakat.
3. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
4. Penataan kawasan kumuh
5. Pengembangan System sarana dan prasarana LLAJ
6. Pengembangan System pengembangan teknologi LLAJ

Tabel T-C, 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Melalui Penguatan dan pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan			
MISI : 3 membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada jaringan pengembangan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penataan transportasi publik	Meningkatnya Layanan Perhubungan	1. Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis	1. Pengembangan System sarana dan prasarana LLAJ 2. Pengembangan System pengembangan teknologi LLAJ
MISI : 6 Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Kesehatan Permukiman	Meningkatnya Infrastruktur Kesehatan Permukiman	2. Menyusun dokumen – dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan. 3. Meningkatkan kualitas jalan lingkungan, sarana sanitasi, sarana air bersih, dan penataan kawasan kumuh.	3. Menyusun data base perumahan dan kawasan permukiman. 4. Menyusun masterplan drainase, air bersih, sistem penanggulangan kebakaran, penataan kawasan kumuh, dan penataan sanitasi masyarakat. 5. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. 6. Penataan kawasan kumuh

Tabel T-C, 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2016-2021

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat Melalui Penguatan dan pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan			
MISI : 7 Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap perhubungan, perumahan dan permukiman			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	1. IKM Terhadap Layanan Perhubungan		
	2. Meningkatnya infrastruktur kesehatan permukiman		

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Dalam mendukung terlaksananya Visi Misi Bupati terpilih Perangkat Daerah didukung Program dan Kegiatan serta Pendanaan nya sehingga Visi Misi Bupati terpilih bisa tercapai, adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Pendannan seperti pada Tabel TC -27

TABEL T-C 27
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator tujuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Sasaran	Indikator sasaran	Target						Lokasi
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1				2	3	9	11	13	15		17	21
Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perumahan dan permukiman yang sehat sesuai dengan sistem tata ruang yang berwawasan	Meningkatnya infrastruktur	39,24 %	100	meningkatkan kualitas perumahan sehat	Persentase peningkatan rumah layak huni	39,24	10,32	25	33,33	50	100	Wilayah Kab. Mojokerto
		0,109 %	0		Persentase penurunan luas kawasan kumuh	0,109	0,089	0,05	0	0	0	
		74,44%	0		Persentase Peningkatan akses penggunaa n air bersih	74,44	79,9	89,9	100	100	100	

Meningkatkan pelayanan teknis dalam rangka menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi penyedia jasa pengguna transportasi kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	65%	70%		Persentase Fasilitas Sarana prasarana jalan yang terpasang	65	60	60	65	65	70	
		100%	100		Presentase angkutan umum yang layak jalan	100	100	100	100	100	100	
		55%	65%		Penghargaan WTN	55	55	60	60	65	65	

Tabel 6.1

(Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun ke 1 (2016)		Tahun ke 2 (2017)		Tahun ke 3 (2018)		Tahun ke 4 (2019)		Tahun ke 5 (2020)		Tahun ke 6 (2021)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Targe t	Rp.	Target	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Mojokerto	Meningkatnya dukungan konektivitas wilayah pertumbuhan/wilayah kawasan potensial		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran		100	987,440,000	100	981,265,000	100	1,120,940,000										
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	jumlah waktu penyedia jasa komunikasi, sumber daya air & listrik		12 bl	175,000,000	12 bl	200,000,000	12bl	228,000,000										

			Penyediaan Jasa Pem.& Perijinan Kend.Dinas / Ops.	jumlah pemeliharaan perpanjangan perizinan kendaraan operasional dinas		12 bl	10,000,000	12 bl	19,100,000	12bl	25,000,000										
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis alat tulis yang disediakan kertas, bulpoin, dll		12 bl	30,000,000	12 bl	33,250,000	12bl	37,500,000										
			Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jenis barang yg dicetak dan yang disediakan surat menyurat		1 kali	500,000,000	1 kali	550,000,000	1 kali	600,000,000										
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan AC, Komputer dll		1 kali	50,000,000	1 kali	29,375,000	1 kali	75,000,000										
			Penyediaan Makanan & Minuman	jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu		12 bl	100,000,000	12 bl	31,350,000	12 bl	33,000,000										
			Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar & Dalam Daerah	jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas rapat koordinasi, konsultasi keluar dan dalam daerah		12 bl	85,000,000	12 bl	80,750,000	12 bl	85,000,000										
			Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	jumlah tenaga kerja selama 12 bulan		3 THL	37,440,000	3 THL	37,440,000	3 THL	37,440,000										
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</i>		100	141,500,000	100	115,655,000	100	210,000,000										

			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang berfungsi baik		12 bl	36,500,0 00	12 bl	19,955, 000	12 bl	30,000,0 00									
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik		12 bl	20,000,0 00	12 bl	20,000, 000	12 bl	20,000,0 00									
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend.Dinas Ops.	penyediaan BBM Kepala Dinas slm 12 Bulan dan jumlah servis ganti suku cadang, oli mobil dinas		12 bl	55,000,0 00	12 bl	55,000, 000	12 bl	55,000,0 00									
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik		3 bangu nan	30,000,0 00	3 bangu nan	20,700, 000	3 bangu nan	30,000,0 00									
			Pengadaan Peralatan Survey Permukiman dan Pertanahan	Jumlah peralatan survey permukiman dan pertanahan		0	0	0	0	1 paket	75,000,0 00									
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur Negara	<i>Persentase Pemenhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</i>		100	357,000, 000	100	0	100	30,760,0 00									
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a	Jumlah pakaian dinas pegawai (PNS) yang disediakan		100 stel	357,000, 000	0	0	100 stel	30,760,0 00									
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	<i>persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</i>		100	10,000,0 00	10000 %	10,000, 000	100	10,000,0 00									

			Penyusunan Rencana Tahunan Dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun		7 lap	10,000,000	7 lap	10,000,000	7 lap	10,000,000										
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	<i>Nominasi Tingkat Nasional</i>		100	1,320,000,000	100	1,245,970,000	100	1,225,000,000										
			Penganugerahan Duta Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	Nominasi Tingkat Nasional		100	75,000,000	100	85,000,000	100	75,000,000										
			Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	Persentase Wilayah Layanan Perparkiran		80	550,000,000	83	555,970,000	85	550,000,000										
			Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	persentase pengamanan lalu lintas		80	50,000,000	85	50,000,000	87	50,000,000										
			Peningkatan Disiplin Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Forum LLAJ	Persentase Kendaraan Angkutan Umum Yang Laik Jalan		80	70,000,000	83	70,000,000	85	70,000,000										
			Duta Tertib Lalu Lintas	Persentase Kendaraan Angkutan Umum Yang Laik Jalan		80	30,000,000	83	30,000,000	85	40,000,000										
			Pengamanan Insidentil	persentase pengamanan lalu lintas		80		85	60,000,000	87	60,000,000										
			Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan	Persentase Kendaraan Angkutan Yang Laik Jalan		80	30,000,000	83	30,000,000	85	30,000,000										
			Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Uji		80	75,000,000	83	75,000,000	85	75,000,000										
			Pengadaan Sistem Aplikasi	Indeks Kepuasan		70	150,000,000	75	0	80	0										

			PKB	Masyarakat tentang layanan Perhubungan																	
			Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat tentang layanan Perhubungan		70	290,000,000	75	290,000,000	80	275,000,000										
			Program Pengembangan Perumahan	<i>Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh</i>		0	0	0.089	187,880,000	25	701,000,000										
			BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh		0	0	0.089	0	25	50,000,000										
			BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan		0	0	35.67	187,880,000	45	60,000,000										
			Penunjang DAK Bidang Perumahan	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan		0	0	35.67	0	45	233,000,000										
			Penunjang DAK Bidang Perumahan (DAK)	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan		0	0	35.67	0	45	233,000,000										
			Sinkronisasi Data Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh		0	0	0.089	0	0.05											
			BOP Penerbitan Rekomendasi Ijin Lokasi	Persentase Penurunan Luas Kawasan		0	0	0.089	0	0.05	0										

			Penataan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman	Kumuh Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh		0	0	0.089	0	0.05	60,000,000									
			Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh		0	0	0.089	0	0.05	65,000,000									
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	<i>Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan</i>		0	0	35.67	165,000,000	45	125,000,000									
			Penunjang Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Pondok Pesantren	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan		0	0	35.67	115,000,000	45										
			Penunjang Kegiatan TIM Verifikasi PSU Perumahan	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan		0	0	35.67	0	45	0									
			Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh		0	0	0.089		0.05										
			BOP Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh		0	0	0.089	50,000,000	0.05	75,000,000									
			BOP Penerbitan Rekomendasi Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh		0	0	0.089	0	0.05	50,000,000									

			Program Air Bersih Sanitasi	Persentase Cakupan sanitasi di kawasan permukiman		0	0	79.90	110,000,000	89.9	115,000,000										
			BOP Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Persentase Cakupan sanitasi di kawasan permukiman		0	0	79.9	110,000,000	89.9	115,000,000										
			Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang		65	800,000,000	60	880,000,000	60	733,877,000										
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang		65	50,000,000	60	30,000,000	60	30,000,000										
			Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang		65	150,000,000	60	200,000,000	60	150,000,000										
			Pengadaan Peningkatan Fasilitas Penunjang Jalan	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang		65	600,000,000	60	650,000,000	60	553,877,000										
			Pengadaan Flasher dan Warning light	meningkatkan pelayanan lalu lintas		65	-	60	-	60	-										
			Total				3,615,940,000		3,695,770,000		4,271,577,000										
2019																					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran								100%	1,162,000,000	100%	1,162,000,000	100%	1,162,000,000	100%	1,162,000,000		

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	jumlah waktu penyedia jasa komunikasi, sumber daya air & listrik							12 bl	230,000,000	12 bl	230,000,000	12 bl	230,000,000	12 bl	230,000,000		
			Penyediaan Jasa Pem. & Perijinan Kend.Dinas / Ops.	jumlah pemeliharaan perpanjangan perizinan kendaraan operasional dinas							12 bl	25,000,000	12 bl	25,000,000	12 bl	25,000,000	12 bl	25,000,000		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis alat tulis yang disediakan kertas, bulpoin, dll							12 bl	37,000,000	12 bl	37,000,000	12 bl	37,000,000	12 bl	37,000,000		
			Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jenis barang yg dicetak dan yang disediakan surat menyurat							1 kali	650,000,000	1 kali	650,000,000	1 kali	650,000,000	1 kali	650,000,000		
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan AC, Komputer dll							1 kali	85,000,000	1 kali	85,000,000	1 kali	85,000,000	1 kali	85,000,000		
			Penyediaan Makanan & Minuman	jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu							12 bl	35,000,000	12 bl	35,000,000	12 bl	35,000,000	12 bl	35,000,000		
			Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar & Dalam Daerah	jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas rapat koordinasi, konsultasi keluar dan dalam daerah							12 bl	50,000,000	12 bl	50,000,000	12 bl	50,000,000	12 bl	50,000,000		
			Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	jumlah tenaga kerja selama 12 bulan							4 THL	50,000,000	4 THL	50,000,000	4 THL	50,000,000	4 THL	50,000,000		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarpras aparatur dengan kondisi							92%	207,000,000	92%	207,000,000	92%	207,000,000	92%	207,000,000		

			Aparatur	layak fungsi																
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang berfungsi baik						12 bl	35,000,0 00	12 bl	35,000,0 00	12 bl	35,000,0 00	12 bl	35,000,0 00			
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik						12 bl	20,000,0 00	12 bl	20,000,0 00	12 bl	20,000,0 00	12 bl	20,000,0 00			
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend.Dinas Ops.	penyediaan BBM Kepala Dinas slm 12 Bulan dan jumlah servis ganti suku cadang, oli mobil dinas						12 bl	50,000,0 00	12 bl	50,000,0 00	12 bl	50,000,0 00	12 bl	50,000,0 00			
			Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik						3 bangu nan	27,000,0 00	3 bangu nan	27,000,0 00	3 bangu nan	27,000,0 00	3 bangu nan	27,000,0 00			
			Pengadaan Peralatan Survey Permukiman dan Pertanahan	Jumlah peralatan survey permukiman dan pertanahan						1 paket	75,000,0 00	1 paket	75,000,0 00	1 paket	75,000,0 00	1 paket	75,000,0 00			
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur Negara	persentase pegawai denga TK kedisiplinan kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku						92%	45,000,0 00	92%	45,000,0 00	92%	45,000,0 00	92%	45,000,0 00			
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a	Jumlah pakaian dinas pegawai (PNS) yang disediakan						100 stel	45,000,0 00	100 stel	45,000,0 00	100 stel	45,000,0 00	100 stel	45,000,0 00			
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	persentase dokumen perencanaan laporan keuangan dan kinerja						100%	10,000,0 00	100%	10,000,0 00	100%	10,000,0 00	100%	10,000,0 00			

			Kinerja Dan Keuangan	organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku																
			Penyusunan Rencana Tahunan Dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun						7 lap	10,000,000	7 lap	10,000,000	7 lap	10,000,000	7 lap	10,000,000			
			Program perumahan prasarana sarana dan utilitas umum	persentase lingkungan perumahan yang memenuhi standart kesehatan						50%	642,000,000	50%	642,000,000	50%	642,000,000	50%	642,000,000			
			Pemeliharaan PSU	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan							192,000,000		192,000,000		192,000,000		192,000,000			
			SOP Verifikasi PSU	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan							50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000			
			Rehabilitasi rumah Korban Bencana Alam								100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000			
			Penunjang DAK Perumahan	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan							150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000			
			Pendataan RTLH	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan							50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000			

			Penunjang DAK Perumahan	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan																
			BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan								50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		
			Pengawasan , pengendalian dan penyerahan lingkungan Perumahan	Persentase Lingkungan Perumahan yang Memenuhi Standar Kesehatan								50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		
			Program kawasan permukiman dan pertanian	persentase penurunan luas kawasan kumuh							80%	342,000,000	80%	342,000,000	80%	342,000,000	80%	342,000,000		
			BOP Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah	Tercapainya peningkatan kualitas kawasan permukiman								25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		
			Penyusunan dokumen rencana penataan lingkungan (RPLP) pada lokasi SK Kumuh	Tersedianya Penyusunan dokumen rencana penataan lingkungan (RPLP) pada lokasi SK Kumuh								50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		
			Pembangunan Sarana Pendukung Kawasan Permukiman	tercukupinya kebutuhan sarana permukiman yang layak								100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		
			BOP Penyediaan Air Minum dan	tercukupinya kebutuhan sarana								25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		

			sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	permukiman yang layak																
			BOP Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	tercukupinya kebutuhan sarana permukiman yang layak							25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000			
			Penyusunan Naskah Akademik Perda Pemakaman	terlaksananya pelaksanaan pemanfaatan lahan							25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000			
			Pengadaan Peralatan Survey Permukiman dan Pertanahan	tersedianya kebutuhan peralatan survey terkait kawasan permukiman dan pertanahan							15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000			
			BOP Penerbitan Rekomendasi Ijin Permukiman dan pertanahan	terlaksananya pelaksanaan pemanfaatan lahan							27,000,000		27,000,000		27,000,000		27,000,000			
			Sinkronisasi Data Pertanahan	tersedianya data pertanahan untuk pemanfaatan tanah							50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000			
			Program prasarana lalulintas	persentase fasilitas sarana prasarana jalan yang terpasang						65%	3,697,000,000	65%	3,697,000,000	65%	3,697,000,000	65%	3,697,000,000			
			Pengadaan Peningkatan Fasilitas Penunjang Jalan	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang							1,640,000,000		1,640,000,000		1,640,000,000		1,640,000,000			
			Pengadaan Flasher dan Warning light	meningkatnya pelayanan lalulintas							200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000			
			Rehabilitasi / Pemeliharaan	Persentase Fasilitas							300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000			

			Rambu-rambu Lalu Lintas	Sarana Prasarana jalan yang terpasang																
			Pengadaan rambu-rambu APILL	Tersedianya Perlengkapan jalan berupa APILL dan Rambu							500,000, 000		500,000, 000		500,000, 000		500,000, 000			
			Penignkatan Pengelolaan Perparkiran	terbayarnya juru parkir selama 1 tahun							1,027,00 0,000		1,027,00 0,000		1,027,00 0,000		1,027,00 0,000			
			Rehabilitasi/Pe meliharaan Terminal/Pelab uhan	Persentase Fasilitas Sarana Prasarana jalan yang terpasang							30,000,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00		30,000,0 00			
			Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	nominasi WTN Tingkat Nasional						100%	1,565,00 0,000	100%	1,565,00 0,000	100%	1,565,00 0,000	100%	1,565,00 0,000			
			Peningkatan Disiplin Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Forum LLAJ	Persentase Kendaraan Angkutan Umum Yang Laik Jalan							200,000, 000		200,000, 000		200,000, 000		200,000, 000			
			Penganugrahan Duta Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	Nominasi Tingkat Nasional							90,000,0 00		90,000,0 00		90,000,0 00		90,000,0 00			
			Duta Tertib Lalu Lintas	Persentase Kendaraan Angkutan Umum Yang Laik Jalan							100,000, 000		100,000, 000		100,000, 000		100,000, 000			
			Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Angkutan Jalan	Persentase Kendaraan Angkutan Yang Laik Jalan							50,000,0 00		50,000,0 00		50,000,0 00		50,000,0 00			
			Pengamanan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	persentase pengamanan lalu lintas							100,000, 000		100,000, 000		100,000, 000		100,000, 000			
			Pengamanan Insidentil	persentase pengamanan lalu lintas							150,000, 000		150,000, 000		150,000, 000		150,000, 000			

			Pemeliharaan Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Uji									125,000,000		125,000,000		125,000,000		125,000,000		
			Pengadaan Sistem Aplikasi PKB	Indeks Kepuasan Masyarakat tentang layanan Perhubungan									250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		
			Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat tentang layanan Perhubungan									300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		
			Fasilitasi manajemen dan rekayasa lalu lintas	Tersedianya dokumen tatralok kabupaten Mojokerto dan Data Kebutuhan									200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		
			TOTAL										7,670,000,000		7,670,000,000		7,670,000,000		7,670,000,000		
2021																					
			PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPAT																11.806.202.477	APBD	

			EN/KOTA																		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan kesekret arian PD														20.000.000	APBD		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Jumlah dokumen yang dapat tersusun													100	10.000.000	APBD		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan PD													100	10.000.000	APBD		
			Administrasi	Indeks kepuasan														10.233.452.477	APBD		

			asi Keuangan Perangkat Daerah	masyarak at/ aparatur terhadap pelayana n kesekret ariatan PD																
			Penyediaa n Gaji dan Tunjanga n ASN	Jumlah waktu pemenuh an gaji dan tunjanga n ASN													14 bln	10.078. 452.477	APBD	
			Penyediaa n Administr asi Pelaksana an Tugas ASN	Jumlah penyedia an jasa administr asi keuanga n selama 12 bulan													12 Bln	155.000 .000	APBD	
			Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan	Indeks kepuasan masyarak at/														487.000 .000	APBD	

			Pemerintah Daerah	aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD																
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik													12 Bln	208.000.000	APBD	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan													12 bln	180.000.000	APBD	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jenis peralatan dan perlengk													12 bln	99.000.000	APBD	

			Perlengkapan Kantor	apan kantor yang disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.																
			Administrasi Umum Perangkat Daerah															810.000.000	APBD	
			Penyediaan Bahan/Material	Jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll													12 bln	30.000.000	APBD	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan pengadaan													12 bln	700.000.000	APBD	

				yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi																
			Fasilitas Kunjung Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman													12 bln	25.000.000	APBD	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas luardaerah 12 Bulan													12 bln	55.000.000	APBD	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah															120.750.000	APBD	

			Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah																	
			Penyediaa n Jasa Pemeliha aan, Biaya Pemeliha aan, Pajak, dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah pemeliha raan /perpanj angan perizinan kendaraa n dinas operasio nal													1 Tahu n	67.750. 000	APBD	
			Pemeliha aan/Reha bilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpeliha ra dan berfungsi dengan baik													12 bln	18.000. 000	APBD	
			Pemeliha aan/Reha	Jumlah peralatan													12 bln	35.000. 000	APBD	

			bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor yang terpelihara dengan baik																
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan PD														135.000.000	APBD	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi													80 org	75.000.000	APBD	

			Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	i Jumlah kegiatan sosialisas i perunda ng- undanga n yang terlaksan a														100%	60.000.000	APBD	
			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Dan Permukiman															Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Dan Permukiman			
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tingkat Pengembangan Perumahan															50.000.000	APBD	

			Pendataa n Penyedia an Dan Rehabilita si Rumah korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupate n/Kota	Tingkat Pengemb angan Perumah an														50.000. 000	APBD	
			Pendataa n Rumah Sewa Milik Masyarak at, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah sewa milik masyarak at, rumah susun dan rumah khusus yang terdata													1 Lap	50.000. 000	APBD	
			PROGRA M KAWASA	Persenta se Kualitas														1.924.0 63.950	APBD	

			N PERMUKI MAN	Sarana dan Prasaran a Permukiman Layak Huni																
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Kualitas Sarana dan Prasaran a Permukiman Layak Huni														102.000.000	APBD	
			Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah fasilitas penerbitan izin yang terpenuhi													Apk	27.000.000	APBD	

			angan Kawasan Permukim an Terintegra si Secara Elektronik																	
			Koordinas i dan Sinkronisa si Pengenda lian Pembang unan Kawasan Permukim an dan Permukim an Kumuh	Persenta se kegiatank oordinasi dan Sinkronis asi pengend alian pembang unan dan pengemb angan kawasan permuki man dan permuki man kumuh tentang BOP KOTAKU													100%	75.000. 000	APBD	

				Persenta se kegiatan koordina si dan Sinkronis asi pengend alian pembang unan dan pengemb angan kawasan permuki man dan permuki man kumuh tentang BOP PAMSIM AS Persenta se kegiatan koordina si dan Sinkronis																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				asi pengend alian pembang unan dan pengemb angan kawasan permuki man danperm ukiman kumuh tentang BOP Pengemb angan Infrastru ktur Sosial Ekonomi Wilayah																	
			Penataan dan Peningkat an Kualitas Kawasan Permuki																250.000 .000	APBD	

			man Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																	
			Penyusun an Rencana Pencegah an dan Peningkat an Kualitas Perumaha n Kumuh dan Permukim an Kumuh	Jumlah dokumen yang tersusun dan terlegalis asi rencana pembang unan dan pengemb angan kawasan kumuh pada kec. Mojosari													20 Srtfik at	100.000 .000	APBD	
			Koordinas i dan Sinkronisa si Pengenda lian	Jumlah kegiatan koordina si dan Sinkronis													1 Keg	150.000 .000	APBD	

			Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	asi pengendalian pengendalian penataan pemugaran/pere-majaan permukiman kumuh																
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															1.572.063.950	APBD	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah bantuan stimulan perumahan yang													240 unit	1.497.063.950	APBD, APBN	

				terlaksan a Pembang unan Fisik Perumah an Pendamp ing DAK bidang Perumah an (APBD) Penunjan g DAK fisik perumah an																	
			Koordinas i dan Sinkronisa si Pengenda lian Penyeleng garaan Pemugara n/Perema jaan	Skor pengend alian penyelen ggaraan permuki man kumuh yang terlaksan a													1 Keg	75.000. 000	APBD		

			Permukiman Kumuh																	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															3.279.390.627	APBD	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Lingkungan Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan														3.279.390.627	APBD	
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase pemeliharaan PSU													1 Keg	100.000.000	APBD	

			n	Perumahan yang terlaksana																
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase pemeliharaan penyediaan PSU Perumahan yang tersedia untuk menunjang fungsinya													100%	2.638.079.637	APBD	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan													25 rumah	541.310.990	APBD	

			Umum Perumahan	angan perumahan																
			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Perhubungan														Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Urusan Perhubungan			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang terlaksana														6.256.710.400	APBD	
			Penetapan Rencana Induk															288.000.000	APBD	

			Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Lalu Lintas dan Kelancaran Arus Lalu Lintas														100%	90.000.000	APBD	
			Penetapan Kebijakan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang ditetapkan														100%	38.000.000	APBD	

			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kab/kota yang terkendali														15 Rakor	100.000 .000	APBD	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																4.453.8 80.000	APBD	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Rambu APIL Jumlah prasarana jalan (Flasher/Warning														90%	300.000 .000	APBD	

				Light) di jalan kab/kota yang terbangu n Jumlah terminal yang dibangun /dipeliha ra																	
			Penyediaa n Perlengka pan Jalan di Jalan Kabupate n/Kota	Jumlah perlengk apan jalan di jalan kab/kota yang tersedia Jumlah perlengk apan jalan di jalan kab/kota yang tersedia Jumlah													90%	3.916.0 00.000	APBD		

				perlengkap terminal di kab/kota yang tersedia																	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah rambu- rambu lalu lintas yang terehabilitasi													90%	237.880 .000	APBD		
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir															800.000 .000	APBD		
			Fasilitas Pemenuhan Persyaratan	Jumlah fasilitasi pemenuhan persyaratan													100%	800.000 .000	APBD		

			Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	an perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir																
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Pelayanan														210.000.000	APBD	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana													1 SI	100.000.000	APBD	

			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	a pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia																
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana Dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor yang terpelihara													10 Sapras	110.000 .000	APBD	
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk															298.950 .400	APBD	

			Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan dan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lau Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan dan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lau Lintas Jumlah Pengadaan, Pemasangan,														1 Dok	298.880.000	APBD	

				Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka peningkatan fasilitas penunjang jalan																
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu)															265.950.000	APBD	

			Daerah Kabupaten/Kota																	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum yang tersedia													10 org/ keg	50.000. 000	APBD	
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk	Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi														11.806. 202.477	APBD	

			Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	guna duta tertib lalu lintas Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi saat lebaran, natal dan tahun baru Jumlah ketersediaan angkutan umum yang terkendali dan terawasi serta pembina																
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				n angkutan jalan																	
--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra OPD.

Fungsi pengendalian dan keterkaitan antara RPJMD Perubahan dan Perubahan Renstra OPD secara umum dapat dilihat dan diukur melalui penetapan Indikator Kinerja PD yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan.

Indikator Kinerja PD secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai PD dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja merupakan suatu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Kinerja organisasi, Keberhasilan dalam mencapai target indikator Kinerja ditandai dengan terpenuhinya target tersebut. Indikator yang ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan harus memiliki kaitan yang erat dengan indikator kinerja Pembangunan Jawa Timur dalam RPJMD.

Adanya keterkaitan antar Indikator tersebut dapat menyelaraskan Outcome dan Impact dari Program Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu OPD yang bertanggung jawab terhadap bidang Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan di Kabupaten Mojokerto.

Dalam Tanggung Jawab untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada Perumahan, Permukiman dan Perhubungan agar mampu mencapai inovatif, Edukatif dan Kreatif, untuk dapat mengukur kebijaksanaan Pembangunan dibidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan dibutuhkan yang dapat menunjukkan Akuntabilitas capaian kinerja Indikator Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang mencapai pada Tujuan dan sasaran RPJMD,

Adapun Tabel yang mendukung Komitmen Perangkat Daerah kami jabarkan pada Tabel TC -28

Tabel TC -28

Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase penurunan luas kawasan kumuh	0.109%	0.109%	0.089%	0.05%	0%	0%	0%	0%
2	Prosentase peningkatan rumah layak huni	39.24%	39.24%	10.32%	25%	33.33%	50%	100%	100%
3	Persentase peningkatan akses penggunaan air bersih	249.156 74.99%	249.15 6 74.99%	265.87 3 kk 79.9%	299.10 7 kk 89.9%	332.34 2 kk 100%	332.34 2 kk 100%	332.34 2 kk 100%	332.342 kk 100%
4	Persentase fasilitas sarana prasarana jalan yang terpasang	65%	65%	60%	60%	65%	65%	70%	70%
5	Persentase angkutan umum yang layak jalan	55%	55%	55%	60%	60%	65%	65%	65%
6	Penghargaan WTN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan tahun 2016–2021 ini dibuat dengan memperhatikan langkah-langkah manajemen strategik sehingga diharapkan dapat mengakomodasikan kondisi riil dari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembangunan perhubungan Perumahan, Permukiman dan Perhubungan baik secara makro (eksternal) maupun mikro (internal) dengan mempertimbangan kondisi kedepan.

Pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan tahun 2016–2021 ini merupakan acuan dasar yang terdiri dari kegiatan pokok dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Karena perkembangan kondisi makro sangatlah cepat tentunya akan memerlukan penyesuaian-penyesuaian sehingga menjadi fleksibel tetapi tetap dalam koridor/tatanan yang memegang azas kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan bertanggung jawab sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Demikianlah perencanaan strategik dari pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto tahun 2016–2021 ini dibuat untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Perumahan, Permukiman dan Perhubungan guna terlaksananya pembangunan yang terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan dan tepat sasaran.